



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# PAJAK KARBON & PEREKONOMIAN INDONESIA

JAKARTA, 6 OKTOBER 2021

TAX



# VISI INDONESIA MAJU 2045

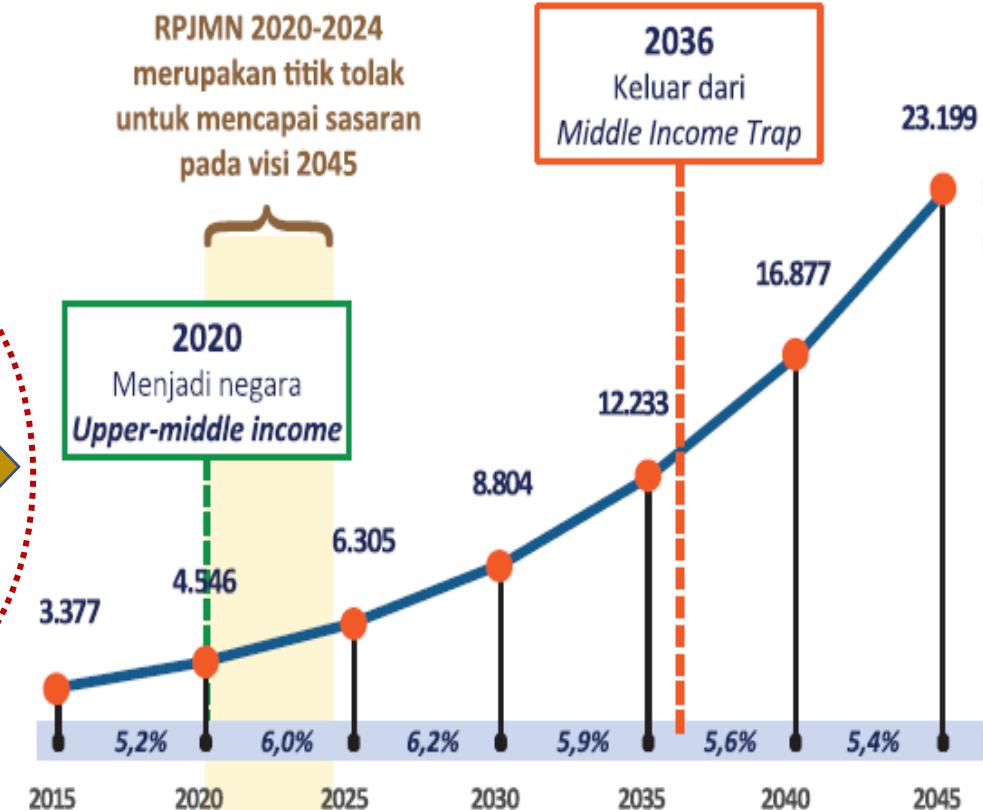


RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045

**2020**  
Menjadi negara  
*Upper-middle income*

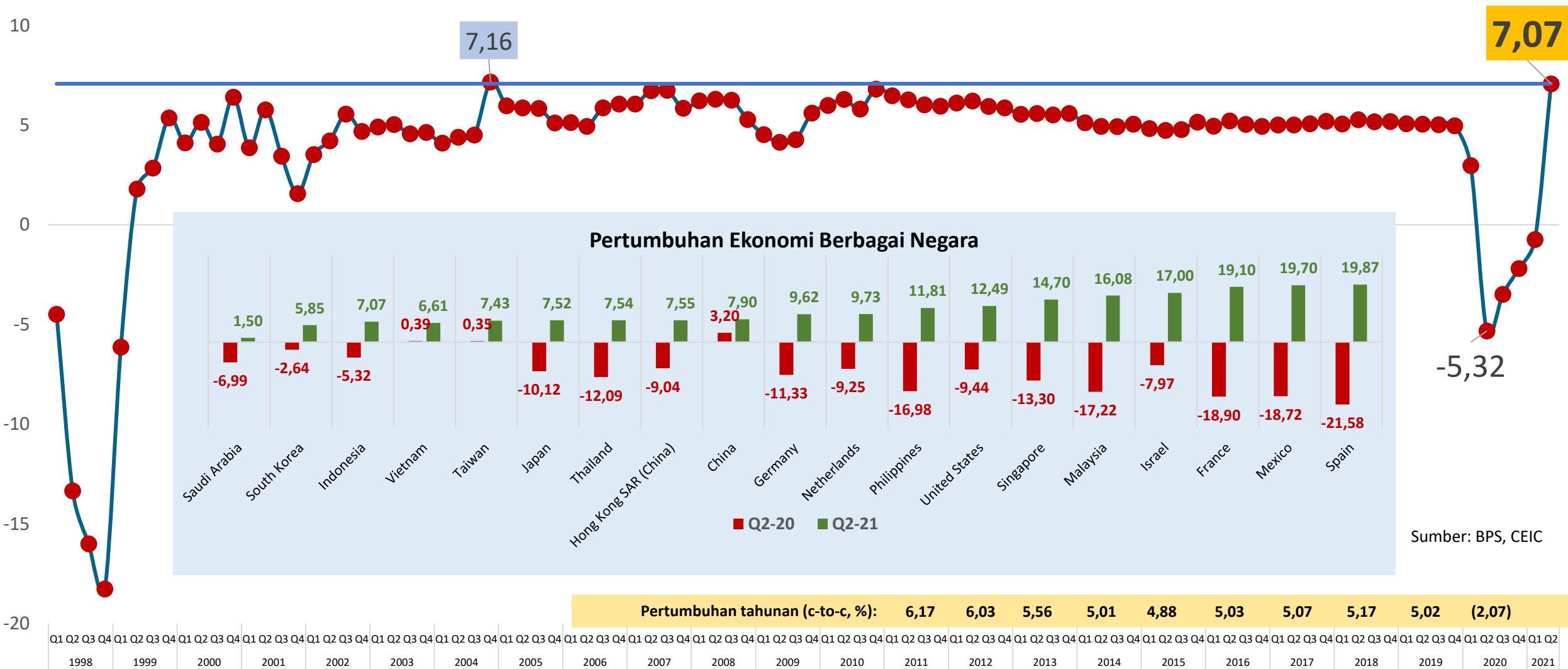
Growth  
6%



Visi Indonesia Maju 2045

## EKONOMI INDONESIA MENGALAMI TEKANAN YANG LUAR BIASA DI TAHUN 2020

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi yang dalam dampak dari pandemi Covid-19. Namun perlahan mulai bangkit dan pada Q2-2021 mencapai 7,07%(YoY).



# PADA TAHUN 2020, DUNIA MENGHADAPI KEJADIAN TAK TERDUGA DAN LUAR BIASA

Pandemi Covid-19 berdampak hebat ke seluruh dunia, memicu karantina wilayah dan memakan korban jiwa

<b>218</b> NEGARA TERJANGKIT	<b>&gt;100</b> NEGARA LOCKDOWN; ~ 2,6 MILIAR ORANG TERDAMPAK
------------------------------------	---

## Update Harian Covid-19 per 30 September 2021

**4.215.104**  
KASUS KONFIRMASI (+1.690)

**36.141**  
KASUS AKTIF (0,86%) | Global\* 7,81%

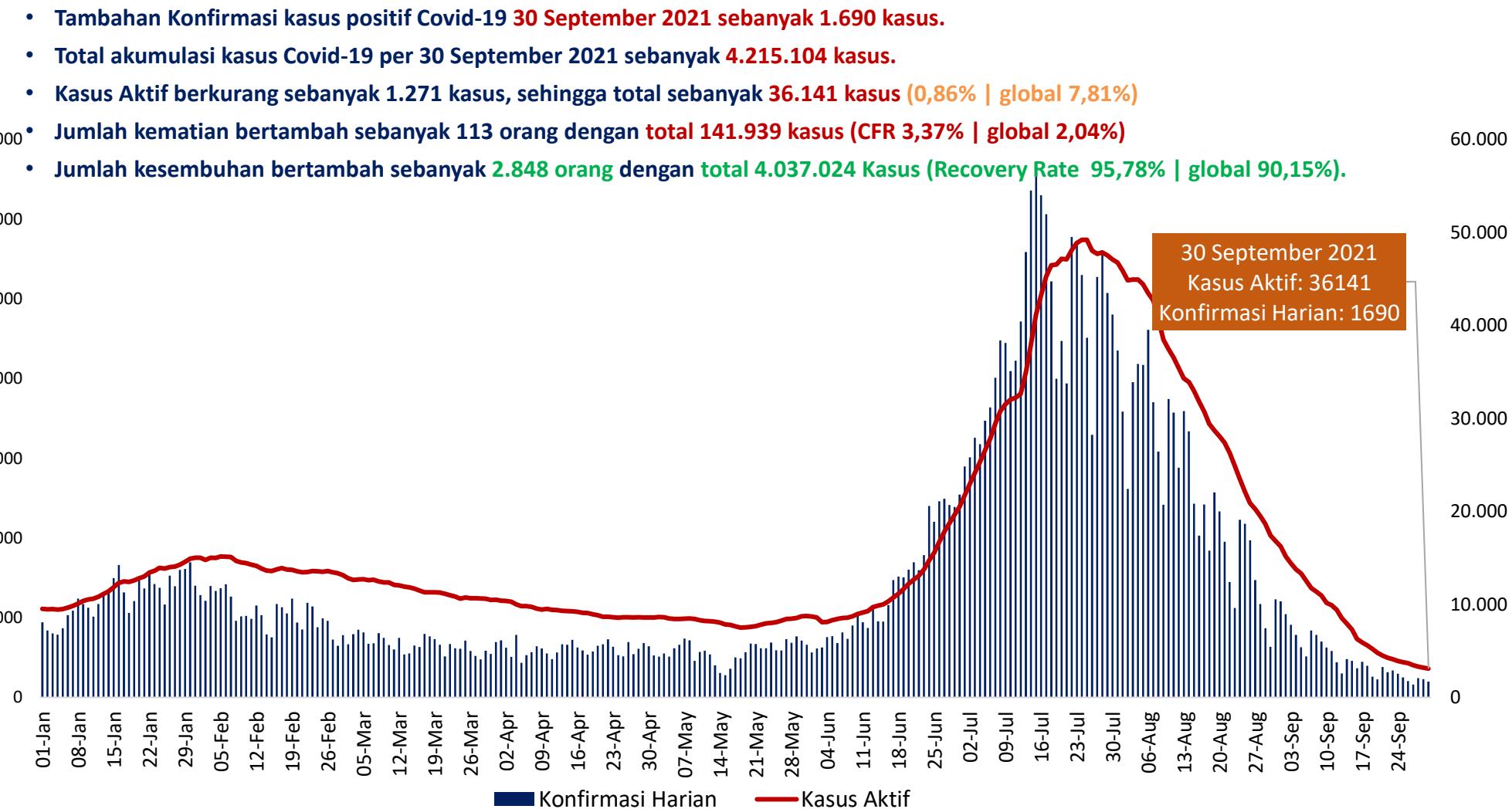
**4.037.024**  
SEMBUH (95,78%) | Global\* 90,15%

**141.939**  
MENINGGAL (3,37%) | Global\* 2,04%

**26.148.296**  
TOTAL ORANG DIPERIKSA  
(+193.809)

**39.121.485**  
TOTAL SPESIMEN DIPERIKSA  
(+276.135)

### Grafik Perkembangan Kasus Konfirmasi Harian & Kasus Aktif Covid-19



Sumber Data:

• Kementerian Kesehatan, Worldometers.info

# 6 STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI 2021

Pemerintah mencanangkan enam strategi untuk bangkit dari pandemi sekaligus menghindari “*Middle Income Trap*”



Strategi 1

- SDM Berdaya Saing**
- Sistem Kesehatan
  - Pendidikan
  - Riset dan Inovasi



Strategi 3

- Ekonomi Hijau**
- Ekonomi Rendah Karbon
  - *Blue Economy*
  - Transisi Energi



Strategi 5

- Integrasi Ekonomi Domestik**
- Infrastruktur
  - Konektivitas
  - Domestic Value Chain



Strategi 2

- Produktivitas Sektor Ekonomi**
- Industrialisasi
  - Produktivitas UMKM
  - Modernisasi Pertanian



Strategi 4

- Transformasi Digital**
- Infrastruktur Digital
  - Pemanfaatan Digital
  - Penguatan *Enabler*



Strategi 6

- Pemindahan IKN**
- Sumber
  - Pertumbuhan Baru
  - Menyeimbangkan Ekonomi Antarwilayah

# KOMITMEN INDONESIA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

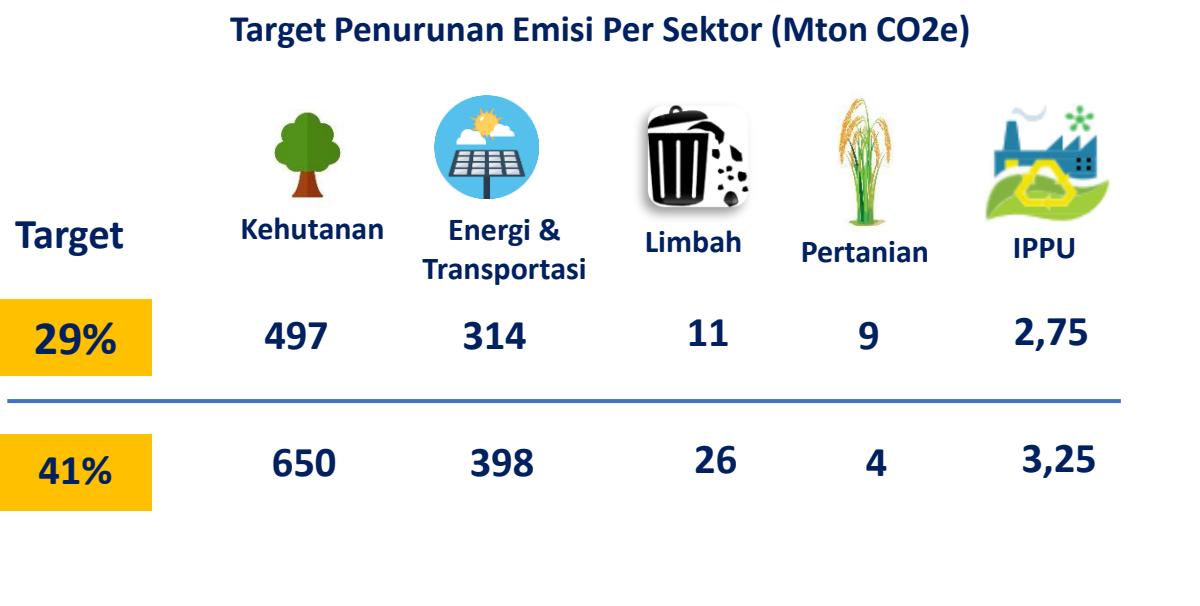
Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

## Kebijakan Perubahan Iklim Nasional

1994	Ratifikasi UNFCCC ke UU No. 6/1994
2004	Ratifikasi Kyoto Protocol ke UU No. 17/2004
2011 dan 2014	RAN-GRK dan RAN-API
2016	Ratifikasi Paris Agreement ke UU No. 16/2016
2016	Penyampaian NDC ke UNFCCC
2020	RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional ke 6
2021	Penyampaian Update NDC dan LTS-LCRR 2050

Melalui *Nationally Determined Contribution (NDC)* Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK dari level BaU pada tahun 2030 sebesar:

29% melalui upaya nasional & 41% dengan dukungan internasional



## Kebutuhan Biaya Mitigasi Perubahan Iklim

Rp3.461 triliun\*  
(akumulatif hingga 2030)

Rp3.779 triliun\*\*  
(akumulatif 2020-2030/Rp343 triliun per tahun)

## Keterbatasan Ruang Fiskal

Sumber: \*Second Biennial Update Report (2018)  
\*\*Roadmap NDC (2020)

# PAJAK KARBON SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN KEBIJAKAN MENUJU EKONOMI HIJAU DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## Fungsi

Pajak karbon tidak hanya sebagai tambahan pendapatan negara, namun lebih jauh lagi berfungsi untuk:



Mengurangi konsumsi dari barang yang dapat menghasilkan emisi GRK



Internalisasi biaya eksternal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan

Pajak karbon menjadi salah satu instrumen fiskal untuk mendukung Pembangunan Rendah Karbon menuju Ekonomi hijau dan pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan serta Visi Indonesia 2045



Ekonomi Hijau  
sebagai bagian dari  
Transformasi  
Ekonomi



Pencapaian  
target SDGs  
dan Visi  
Indonesia  
2045

Sumber: Bappenas

# PAJAK KARBON: *PIGOUVIAN TAX or SIN TAX?*



Pigouvian Tax adalah pajak yang dikenakan terhadap individu/badan atas aktivitas ekonomi yang menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat/menciptakan eksternalitas negatif (*Tax Foundation*, 2019).

A sin tax is an excise tax specifically levied on certain goods deemed harmful to society and individuals, for example alcohol and tobacco, drugs, soft drinks, fast foods, gambling, etc.

In contrast to Pigouvian taxes, which are to pay for the damage to society caused by these goods, sin taxes are used to increase the price in an effort to lower demand, or failing that, to increase and find new sources of revenue. (*Wikipedia*)



## **Pasal 23A UUD 1945:**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

# PAJAK KARBON DALAM RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)

RUU HPP sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk membangun system perpajakan yang Adil, Efektif, dan Sederhana



# PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK KARBON DI INDONESIA



# RUU HPP MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM UNTUK PENGENAAN PAJAK KARBON

## Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penerapan (PP & PMK)

### Simple Design

Design pungutan pajak karbon yang sederhana dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi beban administrasi baik bagi Pemerintah maupun dunia usaha

### Pengenalan Secara Bertahap

Memperkenalkan pajak karbon dan kenaikannya secara bertahap dapat meningkatkan penerimaan dari industri dan memberikan waktu bagi dunia usaha untuk beradaptasi. Sebagai contoh beberapa negara memerlukan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya pajak karbon disahkan secara hukum.

Australia : 2008-2014

Afrika Selatan: 2006-2019

Kanada : 2015-2021

Swedia : 1924-1990

Kolombia: 2004-2017

Inggris : 1996-2001

### Kejelasan Mengenai Nilai

Design pajak karbon harus memberikan kejelasan dalam hal tarif pajak yang dibedakan berdasarkan kandungan karbon untuk setiap jenis bahan bakar

### Pemanfaatan Pajak Karbon Secara Terarah

Pemanfaatan pendapatan dari pajak karbon untuk berbagai kebijakan yang sejalan dengan pembangunan rendah karbon secara transparan dan akuntabel menjadi penting untuk meningkatkan penerimaan dan mengantisifasi sentimen negatif.

Sumber: Bappenas

*"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"*

# TERIMAKASIH



@perekonomianRI



[www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)



perekonomianRI

